

Determinan Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Dimoderasi Oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Bali.

I Nyoman Arsana¹, I Gusti Ayu Purnamawati², I Made Pradana Adiputra³

Program Studi S2 Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia
Email : inyomanarsanaseak@gmail.com, ayu.purnamawati@undiksha.ac.id, adiputra@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Determinan Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Dimoderasi oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal atau sebab akibat. Sampel penelitian adalah sebesar 145 responden dengan instrument penelitian menggunakan kuesioner. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan software aplikasi Statistical Package for Social Science (SPSS versi 4.0). Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, regulasi/kebijakan berpengaruh positif terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) dapat memoderasi kompetensi sumber daya manusia (X1), komitmen organisasi (X2), regulasi/kebijakan (X3) terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali (Y).

Kata kunci : *Determinan realisasi penyerapan anggaran belanja;*

Abstrak

This study aimed to find out the Determinants of Realization of Budget Absorption Moderated by the Regional Financial Management Information System in the Bali Provincial Government. This type of research is categorized as quantitative research with a causal approach. The research sample consisted of 145 respondents with a research instrument using a questionnaire. The data analysis method in this study used Statistical Package for Social Science (SPSS version 4.0) application software. The results show that human resource competencies, organizational commitment, regulations/policies have a positive effect on the realization of the budget absorption of the Bali Provincial Government and the regional financial management information system (X4) can moderate human resource competencies (X1), organizational commitment (X2), regulations/policies (X3) on the realization of the expenditure absorption of the Bali Provincial Government (Y).

Keywords: *Determinan Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja;*

PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Bali menggunakan sistem informasi akan banyak memberikan manfaat meliputi : pekerjaan dikerjakan lebih cepat dan dapat diakses oleh pihak yang memerlukan. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi akan banyak memberikan kemajuan bagi penggunaannya dalam melakukan aktivitas tetapi masih ada masalah dalam memanfaatkan sistem informasi secara optimal baik dalam menganggarkan kegiatan, merealisasikan kegiatan dan pelaporan keuangan. Masalah yang terjadi adalah realisasi penyerapan anggaran belanja pada akhir tahun anggaran kegiatan, sisa anggaran belanja terlalu tinggi.

Sisa anggaran belanja terlalu tinggi pada akhir tahun anggaran kegiatan menjadi pertanyaan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan tanggungjawaban Pemerintah Provinsi Bali.. Sisa anggaran belanja terlalu tinggi pada akhir tahun anggaran kegiatan juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bali. Hubungan Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan dengan teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan prinsipel dan agen.

Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pencapaian target realisasi penyerapan anggaran, seperti memperbaiki kualitas perencanaan Anggaran, meningkatkan kompetensi

sumber daya manusia, meningkatkan komitmen organisasi, mengeluarkan kebijakan yang cepat dan tepat, serta menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam mengakses pendapatan, menganggarkan kegiatan, merealisasikan kegiatan dan melaporkan kegiatan (Purnamawati, 2018).

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi karena realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali akan dapat direalisasikan bila didukung oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang memadai. Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) digunakan sebagai Variabel Pemoderasi dan didukung oleh 3 (tiga) variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, Komitmen Organisasi dan variabel regulasi/kebijakan maka realisasi penyerapan anggaran belanja akan dapat direalisasikan sesuai dengan anggaran belanja yang di rencanakan. Terkait dengan realisasi penyerapan anggaran belanja dapat direalisasikan sesuai dengan rencana maka komplik kepentingan antara Prinsipel sebagai pemberi kerja (DPR, Temuan BPK, Masyarakat dan pihak terkait lainnya) dengan Pemerintah Provinsi Bali sebagai pelaksana kerja (Agen) akan dapat dihindari maka teori keagenan sangat berhubungan dalam penelitian ini.

Ramadhani et al., (2019) yang melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Barat mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja daerah. Penelitian Kristianingsih et al., (2022) studi empiris pada Perguruan Tinggi Negeri Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek bahwa manajemen anggaran berpengaruh terhadap kualitas penyerapan anggaran. Kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas penyerapan anggaran. Sistem pengendalian internal tidak dapat memoderasi pengaruh manajemen anggaran dan kopetensi sumber daya manusia terhadap kualitas penyerapan anggaran, dan sistem pengendalian internal dapat memoderasi komitmen organisasi terhadap kualitas penyerapan anggaran. Penelitian Sari et al., (2023) di Pemerintah Kota Palembang dimana perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, akan tetapi kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Bali.

Komitmen organisasi dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana aparat pemerintah daerah dapat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Jika suatu organisasi memiliki komitmen organisasi yang kuat maka seharusnya akan dapat mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam menjalankan tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi sesuai apa yang telah direncanakan.

Delia et al., (2021) yang menyatakan Komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, semakin tinggi tingkat komitmen terhadap organisasi maka semakin tinggi tingkat penyerapan anggarannya. Namun berlawanan dengan penelitian Kristianingsih et al., (2022) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2 : Komitmen Organisasi Berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Bali.

Regulasi merupakan sebuah tata aturan yang sengaja dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melakukan suatu kegiatan dan memiliki kekuatan hukum (Purnamawati & Adnyani, 2024). Penelitian yang dikembangkan oleh Oktaliza et al., (2020) menjelaskan bahwa Regulasi berpengaruh positif terhadap proses penyerapan anggaran belanja. Hal ini sejalan dengan penelitian Ramadhani et al., (2019) yang dilakukan dengan teknik wawancara. Ia menyatakan bahwa Regulasi berpengaruh positif terhadap anggaran belanja. Namun berbeda dengan penelitian Sutono et al., (2022) menyatakan bahwa regulasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja.. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H3:Regulasi/Kebijakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Bali.

Teknologi informasi digunakan untuk mengolah, memperoleh, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara agar menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya. Hasil informasi tersebut harus relevan, akurat, dan tepat waktu bagi organisasi, pribadi, bisnis dan pemerintahan yang merupakan informasi strategis dalam menentukan pengambilan keputusan Purnamawati et al., (2020).

Penelitian Shara et al., (2021) yang berjudul Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya

Manusia, Transparansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Medan menemukan pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan APBD pada Pemerintah Kota Medan. Sedangkan penelitian Riandani ,(2021) yang berjudul pengaruh kompetensisumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Lima puluh Kota) menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H4 : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat Memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap.

Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Bali komitmen yang dibangun dalam organisasi tidak terlepas dari sikap dan perilaku individu. Keberhasilan penerapan sistem informasi ditentukan oleh dua faktor yaitu teknis dan non teknis (keperilakuan),namun dalam literatur faktor perilaku yang mempengaruhi keberhasilan implementasi system sangatlah beragam. Menurut Trisnarningsih, (2023) mengatakan bahwa komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu, rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi. Dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi dan didukung oleh sistem informasi yang berkualitas maka realisasi penyerapan anggaran belanja akan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Penelitian Firdaus, (2021) dengan judul Pengaruh Komitmen Organisasi dan pengetahuan manajer terhadap keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi pada perusahaan perbankan di Kota Makassar dimana Komitmen organisasi karyawan berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Hasil Penelitian Hermenda, (2020) Komitmen organisasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Buruknya kualitas laporan keuangan khususnya pada Pemerintah Daerah tidak dipengaruhi oleh komitmen organisasi, walaupun para ASN memiliki komitmen organisasi yang baik namun hal ini tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. sehingga dapat di hipotesiskan :

H5 : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat Memoderasi Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Bali.

Adanya dukungan pimpinan terhadap regulasi diturunkan sebagai payung Hukum dalam merealisasikan penyerapan anggaran belanja maka sumber daya manusia yang melaksanakan tugas akan lebih aman karena sudah ada payung Hukum yang melindungi. Disamping itu didukung oleh manajemen puncak penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas maka realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali akan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. sehingga komplik kepentingan antara Prinsipel sebagai pemberi kerja (DPR, Temuan BPK, Masyarakat dan pihak terkait lainnya) dengan Pemerintah Provinsi Bali sebagai pelaksana kerja (agen) akan dapat dihindari maka teori keagenan sangat berhubungan dalam penelitian ini.

Penelitian Roekhudin et al., (2020), dukungan atasan tidak ada pengaruh terhadap minat penggunaan/implementasi sistem informasi. Sama juga dengan hasil penelitian yang dilakukan Aziz et al., (2020), dukungan atasan bukan merupakan faktor yang menentukan minat penggunaan sistem informasi. sehingga dapat di hipotesiskan :

H6 : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat Memoderasi Regulasi/Kebijakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Bali

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali tahun 2022 sebanyak 29 unit. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif. Sumber data yang digunakan data primer diperoleh langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada responden. Data sekunder diperoleh dari pejabat dan perencanaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran, pejabat dan staf keuangan Pemerintah Provinsi Bali dengan Populasi 145 orang pegawai. Teknik sampling digunakan *purposive sampling*. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode *survey* dengan teknik kuesioner selanjutnya kuesioner tersebut di berikan kepada pejabat dan staf perencanaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran, pejabat dan staf keuangan Pemerintah Provinsi Bali

Variabel penelitian terdiri dari Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Komitmen Organisasi (X2) dan Regulasi (X3) diidentifikasi sebagai variabel independen kemudian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan variabel pemoderasi sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Bali diidentifikasi sebagai variabel dependen.

Dalam mengukur pernyataan kuesioner masing-masing variabel menggunakan Skala Likert dengan pernyataan skala 5 titik poin jawaban yaitu: Sangat Setuju , Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju , Sangat Tidak Setuju. Kualitas Data penelitian tidak berguna bila instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki tingkat keandalan (reliability) dan tingkat keabsahan (validity) yang tinggi. Alat bantu yang digunakan dalam pengujian adalah menggunakan software aplikasi Statistical Package for Social Science (SPSS versi 4.0). Pengujian validitas data dalam penelitian dilakukan secara statistik, data dinyatakan valid jika nilai *r*-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected Item-Total Correlation* > *r*-tabel pada signifikansi 0.05 . Dalam pandangan kuantitatif, suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama Sugiyono,(2019). Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan menggunakan *cronbach's alpha* dengan syarat minimum 0,6. Jika koefisien < 0,6 maka instrumen penelitian dinyatakan tidak reliabel. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat *normal probability plot*, membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal. Dasar pengambilan keputusan a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. b) Jika data menyebar jauh dari diagonal, tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas Ghazali et al., (2020)

Uji multikolinearitas dilakukan dengan mengkuantitatifkan data penelitian ke dalam bentuk angka-angka menggunakan skala *likert 5 poin*, dengan alat analisis statistik regresi linier berganda. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel ini tidak ortogonal adalah variabel yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol Ghazali et al., (2020). Teknik mendeteksi multikolinearitas regresi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai tolerance. Bila nilai tolerance mendekati 1, serta nilai VIF di sekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi Santoso et al., (2019)

Uji heteroskedastisitas untuk melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan SPRED, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi–Y sesungguhnya) yang telah distandardized. Dasar uji heteroskedastisitas adalah:

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas Ghazali et al., (2020)

Analisis regresi linear berganda dipakai dalam pengujian hipotesis menggunakan perhitungan statistik dibantu aplikasi SPSS. Tingkat signifikansi digunakan 0,05 (5%). Model digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai hipotesis 6 adalah regresi linear berganda dengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_7 (X_1 X_4) + \beta_8 (X_2 X_4) + \beta_9 (X_3 X_4) + \epsilon$$

digunakan dalam 2 tahap pengolahan melalui aplikasi SPSS dengan rumus:

$$\text{Tahap 1: } Y = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_4 X_4 + \beta_7 X_1 X_4 + \epsilon_1$$

$$\text{Tahap 2: } Y = \alpha_2 + \beta_2 X_2 + \beta_5 X_4 + \beta_8 X_2 X_4 + \epsilon_2$$

$$\text{Tahap 3: } Y = \alpha_3 + \beta_3 X_3 + \beta_6 X_4 + \beta_9 X_3 X_4 + \epsilon_3$$

Dimana :

Y = Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja

X1= Kopetensi Sumber Daya Manusia

X2= Komitmen Organisasi

X3= Faktor Regulasi/Kebijakan

X4= Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

α = Konstanta

β_1 = Pengaruh X1 terhadap Y β_2 = Pengaruh X2 terhadap Y

β_3 = Pengaruh X3 terhadap Y

β_4 = Pengaruh X4 Sebagai moderasi terhadap X1

β_5 = Pengaruh X4 Sebagai moderasi terhadap X2

β_6 = Pengaruh X4 Sebagai moderasi terhadap X3

β_7 = Pengaruh X1 terhadap Y dengan X4 sebagai moderasi

β_8 = Pengaruh X2 terhadap Y dengan X4 sebagai moderasi

β_9 = Pengaruh X3 terhadap Y dengan X4 sebagai moderasi

ϵ = Standar error

Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung > dari F tabel (Ho ditolak, Ha diterima), sebaliknya jika F hitung < F tabel, maka model tidak signifikan (Ghozali et al 2020). Koefisien korelasi ganda dikatakan signifikan apabila F tabel < F hitung dengan derajat signifikansi 5%. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen Ghazali et al., (2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas Instrumen menggunakan instrument kuesioner skala likert antara 1 sampai 5 pilihan jawaban dari sangat tidak setuju hingga

sangat setuju. Hasil uji validitas penelitian menunjukkan nilai korelasi semua item pertanyaan pada kuesioner untuk keseluruhan indikator dan item bernilai di atas 0,193 signifikansi 5% pada r-tabel maka disimpulkan bahwa seluruh item telah memenuhi syarat validitas.

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan

dengan menggunakan *cronbach's alpha*. Syarat minimum dianggap memenuhi syarat apabila koefisien *alpha cronbach's* 0,6. Jika koefisien *alpha cronbach's* kurang dari 0,6 maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak reliabel. Hasil lengkap disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Uji Reliabilitas Instrument Penelitian

Variabel	Alpha Cronbach	Kesimpulan
Kompetensi sumber daya manusia (X1)	0.681	Reliabel
Komitmen organisasi(X2)	0.699	Reliabel
Faktor regulasi/kebijakan (X3)	0.705	Reliabel
Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4)	0.675	Reliabel
Realisasi penyerapan anggaran belanja (Y)	0.652	Reliabel

Tabel 1 menunjukkan nilai cronbach alpha ke empat variabel penelitian bernilai di atas 0,6 (>0.6). Dengan demikian instrument telah memenuhi persyaratan valid dan reliabel, digunakan untuk analisis data pada tahapan selanjutnya.

Uji multikolinearitas diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflating Factor). Jika nilai VIF<10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas. Hasil pengujian asumsi multikolinearitas ditunjukkan Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kompetensi sumber daya manusia (X1)	0.802	1.246	Non-Multikolinearitas
Komitmen organisasi(X2)	0.819	1.221	Non-Multikolinearitas
Faktor regulasi/kebijakan (X3)	0.913	1.095	Non-Multikolinearitas
Sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah (X4).	0.993	1.007	Non-Multikolinearitas

Tabel 2 nilai VIF seluruhnya di bawah 10 (<10) sehingga seluruh variabel bebas tidak mengandung multikolinearitas artinya keempat variabel bebas yang diteliti tidak saling berhubungan sehingga tepat digunakan sebagai variabel bebas dalam model.

Heteroskedastisitas diuji dengan uji gletjer yaitu meregresikan antara absolut residual dengan

semua variabel bebas. Jika nilai sig (probabilitas) > 0.05, mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai sig < 0.05, mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Tabel 3 menunjukkan hasil uji non-heteroskedastisitas semua variable.

Tabel 3
Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Kompetensi sumber daya manusia (X1)	0.640	Non- heteroskedastisitas
Komitmen organisasi(X2)	0.548	Non- heteroskedastisitas
Faktor regulasi/kebijakan (X3)	0.740	Non- heteroskedastisitas
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X4)	0.101	Non- heteroskedastisitas

Tabel 3 tidak mengandung heteroskedastisitas, karena seluruh nilai sig > 0.05 artinya tidak ada korelasi antara besarnya data dengan residual sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan residual (kesalahan).

Uji koefisien korelasi dilakukan untuk melihat besar hubungan antara dua variabel. Uji koefisien korelasi yang digunakan adalah Pearson Correlation dengan hasil pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Uji Koefisien Korelasi

Variabel	Koefisien Korelasi	Sig (2-Tailed)	Keterangan
Kompetensi sumber daya manusia (X1)	0.581	0.000	Signifikan
Komitmen organisasi(X2)	0.459	0.000	Signifikan
Faktor regulasi/kebijakan (X3)	0.608	0.000	Signifikan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X4)	0.579	0.001	Signifikan

Nilai Sig (2-tailed) yang ditunjukkan pada Tabel 4 sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), terdapat hubungan yang positif dan nyata diantara semua variabel. Koefisien variabel bebas : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Faktor Regulasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap variabel terikat : Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja dapat dikatakan hubungan antara variabel bersifat positif berarti semakin tinggi aktivitas variabel bebas maka akan semakin besar pula variabel terikat.

Koefisien determinasi (R Square) dipakai untuk memprediksi besar kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Syaratnya adalah hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan,

sebaliknya jika hasil dalam uji F tidak signifikan maka nilai koefisien determinasi (R Square) ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Hasil analisis koefisien determinasi (R Square) pada tahap 1 (lihat Tabel 5) menyatakan besarnya koefisien determinasi (R Square) adalah 0.927 memperlihatkan bahwa variasi perubahan pencapaian realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali, ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi serta faktor regulasi sebesar 92,7 %, selebihnya sebesar 7,3 % ditentukan oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Tahap	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of The estimate
1	0.927	0.860	0.857	0.26503
2	0.527	0.278	0.263	0.60200
3	0.541	0.292	0.277	0.59603

Hasil analisis koefisien determinasi (R Square) pada tahap 2 (lihat Tabel 5) menyatakan besarnya koefisien determinasi (R Square) adalah 0,527 memperlihatkan variasi perubahan realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali, ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi serta faktor regulasi yang dimoderasi system informasi pengelolaan keuangan sebesar 52,7%, selebihnya sebesar 47,3% ditentukan oleh faktor lain diluar model penelitian ini. Begitu pula hasil analisis koefisien determinasi (R Square) pada tahap 3 (lihat Tabel 5) besarnya koefisien determinasi (R Square) adalah 0,541 memperlihatkan bahwa variasi perubahan realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah

Provinsi Bali, ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi serta faktor regulasi yang dimoderasi system informasi pengelolaan keuangan sebesar 54,1%, selebihnya sebesar 45,9% ditentukan oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

Pengujian simultan atau uji F untuk mengetahui semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Tabel 6 memperlihatkan hasil uji simultan (uji F), sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tahap	F	Sig.
1	288.823	0,000

2	18,088	0,000
3	19.398	0,000

Kompetensi sumber daya manusia , system informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi dan interaksinya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini ditunjukkan oleh tahap 1 (Tabel 6) hasil uji simultan (uji F) pada tingkat kepercayaan 0.95 atau taraf nyata $\alpha = 0.05$ derajat bebas denominator 140 dan derajat bebas numerator 4, dimana $F\text{-hitung} = 288,823 > F\text{-tabel} = 2.27$ atau dengan nilai probabilitas = 0.000 < 0.05. berarti system informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi dan interaksinya secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali.

Komitmen organisasi, system informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi dan interaksinya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini ditunjukkan oleh tahap 2 (Tabel 6) hasil uji simultan (uji F) pada tingkat kepercayaan 0.95 atau taraf nyata $\alpha = 0.05$ derajat bebas denominator 140 dan derajat bebas numerator 4,dimana $F\text{-hitung} = 18,088 > F\text{-tabel} = 2.27$ atau dengan nilai probabilitas=0.000<0.05 berarti Komitmen organisasi , system informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi dan interaksinya secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali.

Faktor regulasi, system informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi dan interaksinya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali . Hal ini ditunjukkan oleh tahap 3 (Tabel 6) hasil uji simultan (uji F) pada tingkat kepercayaan 0.95 atau taraf nyata $\alpha = 0.05$ derajat bebas denominator 140 dan derajat bebas numerator 4, dimana $F\text{-hitung} = 19,398 > F\text{-tabel} = 2.27$ atau dengan nilai probabilitas = 0.000 < 0.05, berarti Faktor regulasi, system informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi dan interaksinya secara simutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali.

Uji signifikansi individual atau Uji t menggunakan aplikasi SPSS,hasilnya kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali Hal ini ditunjukkan oleh tahap 1 (Tabel 7) dengan hasil uji t pada tingkat kepercayaan 0.95 atau taraf nyata $\alpha = 0.05$ derajat bebas 140, dimana $t\text{-hitung} = 12,922 > t\text{-tabel} = 2.35$ atau dengan nilai probabilitas = 0.000 < 0.05. Hipotesis pertama yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali dapat diterima. Tabel 7 memperlihatkan hasil uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t), sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Variabel Eksogen terhadap Variabel Endogen
Realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali (Y)

Tahap	Variabel	T-Hitung	Sig
1	Konstanta	51.784	0.000
	Kompetensi sumber daya manusia (X1),	12.922	0.000
	Sistem informasi pengelolaan keuangan(X4)	7.449	0.000
	Kompetensi sumber daya manusia (X1)*Sistem informasipengelolaan keuangan(X4)	3.767	0.000
2	Konstanta	27.635	0.000
	Komitmen organisasi(X2)	2.726	0.007
	Sistem informasi pengelolaan keuangan(X4)	3.893	0.000
	Komitmen organisasi(X2) *Sistem informasi pengelolaan keuangan(X4)	3.877	0.003
3	Konstanta	26.215	0.000
	Faktor regulasi/kebijakan (X3)	2.815	0.002
	Sistem informasi pengelolaan keuangan(X4)	3.410	0.001
	Faktor regulasi/kebijakan (X3) *Sistem informasi pengelolaan	2.020	0.045

keuangan(X4)

Komitmen organisasi (X2), secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali (Y).Ditunjukkan tahap 2 (Tabel 8) dengan hasil uji t pada tingkat kepercayaan 0.95 atau taraf nyata $\alpha = 0.05$ derajat bebas 140, dimana t-hitung = 2,726 > t-tabel = 2.35 atau dengan nilai probabilitas = 0.007 < 0.05. maka hipotesis kedua dapat diterima, Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanjaPemerintah Provinsi Bali.

Faktor regulasi (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali (Y).ditunjukkan tahap 3 (Tabel 7) dengan hasil uji t pada tingkat kepercayaan 0.95 atau taraf nyata $\alpha = 0.05$ derajat bebas 140, dimana t-hitung = 2,815 > t-tabel = 2.35 atau nilai probabilitas = 0.002 < 0.05. Dengan demikian hipotesis ke tiga dapat diterima, Faktor regulasi/kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penyerapan

anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali.

Penjelasan di atas tahap uji asumsi klasik data-data dalam penelitian terdistribusi dengan normal dan tidak ada multikolinearitas, heteroskedastisitas disamping itu tidak terdapat autokorelasi. Oleh karena itu data yang ada memenuhi syarat untuk digunakan model regresi linear. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, keterlibatan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) dan interaksinya dengan variabel-variabel bebas kompetensi sumber daya manusia (X1), komitmen organisasi (X2), faktor regulasi/kebijakan (X3), hubungannya dengan variabel terikat realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali (Y), menginginkan analisis yang tidak hanya sampai pada analisis regresi berganda sederhana saja namun dilanjutkan dengan moderat analisis regresi (MRA).

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi

Tahap	Uraian	Koefisien Regresi	T-Hitung	Sig
1	Konstanta	23.854	51.784	0.000
	Kompetensi sumber daya manusia (X1),	0.237	12.922	0.000
	system informasi pengelolaan keuangandaerah(X4)	0.119	7.449	0.000
	Kompetensi sumber daya manusia (X1)*system informas	0.268	3.767	0.000
	pengelolaankeuangan(X4)	0.860		
	R Square	288.823		
	F Hitung	0.000		
2	Konstanta	28.136	27.635	0.000
	komitmen organisasi(X2)	0.075	2.726	0.007
	system informasi pengelolaan keuangandaerah(X4)	0.141	3.893	0.000
	komitmen organisasi(X2) *system informasi pengelolaan	0.003	3.877	0.003
	keuangan(X4)	0.278		
	R Square	18.088		
	F Hitung	0.000		
3	Konstanta	27.569	26.215	0.000
	faktor regulasi/kebijakan (X3)	0.077	2.815	0.002
	system informasi pengelolaan keuangandaerah(X4)	0.123	3.410	0.001
	faktor regulasi/kebijakan (X3) *systeminformasi pengelolaan	0.162	2.020	0.045
	keuangan(X4)	0.292		
	R Square	19.39		
	F Hitung	0.000		

Tabel 8 menggunakan aplikasi SPSS versi 20. dalam penelitian ini, analisis regresi dilakukan dalam 3 tahap yaitu:

Tahap 1 analisis regresi terhadap Kompetensi sumber daya manusia (X1), sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah (X4) sebagai moderasi dan interaksi kompetensi sumber daya manusia (X1) dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) (X1X4). Berdasarkan Tabel 8 hasil analisis regresi tahap 1 sebagai berikut :

Tahap 1..... $Y = \alpha_1 + \beta_1X_1 + \beta_4X_4 + \beta_7X_1X_4 + \epsilon_1$

Hasil analisis regresi tahap 1

$$Y = 23,854 + 0,237 + 0,119 + 0,268$$

$\alpha_1 = 23,854$, artinya jika terjadi perubahan nilai Kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi serta interaksinya sebesar satu satuan, maka nilai persepsi realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah Provinsi Bali akan mengalami perubahan sebesar 23,854.

$\beta_1 = 0,237$, artinya apabila nilai persepsi kompetensi sumber daya manusia meningkat sebesar satu satuan, maka nilai persepsi realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,237 satuan dengan asumsi faktor lain (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi dan interaksi kompetensi sumber daya manusia dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah) konstan.

$B_4 = 0,119$, artinya apabila nilai kompetensi sumber daya manusia meningkat sebesar satu satuan, maka nilai persepsi realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,119 satuan dengan asumsi faktor lain (kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi) konstan.

$B_7 = 0,268$, artinya apabila nilai persepsi kompetensi sumber daya manusia meningkat sebesar satu satuan, maka nilai persepsi realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,268 satuan dengan asumsi faktor lain (kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi) konstan.

Disimpulkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi, Kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mampu memprediksi realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali, Begitu juga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat memoderasi dalam hubungannya antara kompetensi sumber daya manusia dan realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi memperkuat hubungan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali.

Tahap 2 analisis regresi terhadap komitmen organisasi (X2), sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah (X4) sebagai moderasi dan interaksi komitmen organisasi (X2), sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) (X2X4). Berdasarkan Tabel 8 hasil analisis regresi tahap 2 sebagai berikut :

$$\text{Tahap 2.....} Y = \alpha_1 + \beta_2X_2 + \beta_5X_4 + \beta_8X_2X_4 + \epsilon_2$$

Hasil analisis regresi tahap 2

$$Y = 28,136 + 0,075 + 0,141 + 0,003$$

$\alpha_1=28,136$, artinya jika terjadi perubahan nilai komitmen organisasi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi serta interaksinya sebesar satu satuan, maka nilai persepsi realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali akan mengalami perubahan sebesar 28,136.

$\beta_2=0,075$, artinya apabila nilai persepsi komitmen organisasi meningkat sebesar satu satuan, maka nilai persepsi realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,075 satuan dengan asumsi faktor lain (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi dan interaksi komitmen organisasi dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah) konstan.

$B_5=0,141$, artinya apabila nilai komitmen organisasi meningkat sebesar satu satuan, maka nilai persepsi realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,141 satuan dengan asumsi faktor lain (komitmen organisasi dan sistem informasi pengelolaan keuangan sebagai moderasi) konstan.

$B_8=0,003$, artinya apabila nilai persepsi Komitmen organisasi meningkat sebesar satu satuan, maka nilai persepsi realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,003 satuan dengan asumsi faktor lain (komitmen organisasi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi) konstan.

Disimpulkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi. Komitmen organisasi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mampu memprediksi realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali, Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat dijadikan moderasi dalam hubungannya antara komitmen organisasi dan realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi terlihat memperkuat hubungan pengaruh Komitmen organisasi terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali.

Tahap 3, analisis regresi faktor regulasi (X3), sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) sebagai moderasi dan interaksi faktor regulasi/kebijakan (X3), sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4)(X3X4). Berdasarkan Tabel 8 hasil analisis regresi tahap 3 sebagai berikut :

Tahap 3 $Y = \alpha_1 + \beta_3X_2 + \beta_6X_4 + \beta_9X_3X_4 + \epsilon_3$

Hasil analisis regresi tahap 3:

$$Y = 27,569 + 0,077 + 0,123 + 0.162$$

Pengujian hasil analisis regresi tahap 3 (Tabel 8) menunjukkan bahwa:

$\alpha_1 = 27,569$, artinya jika terjadi perubahan nilai faktor regulasi/kebijakan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi serta interaksinya sebesar satu satuan, maka nilai persepsi realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali akan mengalami perubahan sebesar 27,569.

$\beta_3 = 0,077$, artinya apabila nilai persepsi faktor regulasi/kebijakan meningkat sebesar satu satuan, maka nilai persepsi realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,077 satuan dengan asumsi faktor lain (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi dan interaksi faktor regulasi dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah konstan).

$\beta_6 = 0,123$, artinya apabila nilai faktor regulasi meningkat sebesar satu satuan, maka nilai persepsi realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,123 satuan dengan asumsi faktor lain (faktor regulasi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi) konstan.

$\beta_9 = 0.162$, artinya apabila nilai persepsi faktor regulasi/kebijakan meningkat sebesar satu satuan, maka nilai persepsi realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0.162 satuan dengan asumsi faktor lain (faktor regulasi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi) konstan.

Disimpulkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi, faktor regulasi/kebijakan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mampu memprediksi realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat dijadikan moderasi dalam hubungannya antara faktor regulasi/kebijakan dan realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali. Sistem

informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai moderasi terlihat memperkuat hubungan pengaruh faktor regulasi/kebijakan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali.

Dari 3 tahap, analisis regresi tahap I variabel kompetensi sumber daya manusia (X1), sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) sebagai moderasi dan interaksi kompetensi sumber daya manusia (X1), sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) (X1X4). Berdasarkan Tabel 9 hasil analisis regresi tahap 1 yang paling kuat karena koefisien regresinya paling tinggi sebesar 0.268 dan signifikasinya paling sempurna sebesar 0,00.

Pengujian hipotesis ke 1 Kompetensi sumber daya manusia (X1) berpengaruh positif terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Bali (Y). Berdasarkan uji t Kompetensi sumber daya manusia (X1) diperoleh hasil nilai t-hitung sebesar 12,922 jauh lebih besar dari pada t-tabel sebesar 2,35 (t-hitung > t-tabel), nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga hipotesis 1 dapat diterima,

Pengujian hipotesis ke 2 Komitmen organisasi (X2) berpengaruh positif terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali (Y). Berdasarkan uji t komitmen organisasi (X2) diperoleh hasil t-hitung sebesar 2,726 jauh lebih besar dari pada t-tabel sebesar 2,35 (t-hitung > t-tabel) dengan nilai signifikan sebesar 0,007 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 (0,007 < 0,05). Sehingga hipotesis 2 dapat diterima,

Pengujian hipotesis 3 faktor regulasi / kebijakan (X3) berpengaruh positif terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali (Y). Berdasarkan uji t faktor regulasi/kebijakan (X3) diperoleh hasil t-hitung sebesar 2,815 jauh lebih besar dari pada t-tabel sebesar 2,35 (t-hitung > t-tabel) dengan nilai signifikan sebesar 0,002 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 (0,002 < 0,05). Sehingga hipotesis ketiga dapat diterima.

Pengujian hipotesis ke 4 hasil uji F terhadap kompetensi sumber daya manusia (X1), sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) dan interaksi antara kompetensi sumber daya manusia (X1) dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) (X1X4) hasil F hitung sebesar 288,823 jauh lebih besar dari pada F tabel sebesar 2,672 (F hitung > F tabel) dengan nilai p-value sebesar 0,000 atau < nilai probabilitas 0,05 (0,000 < 0,05). sehingga hipotesis ke 4 dapat diterima, bahwa sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah (X4) dapat memoderasi kompetensi sumber daya manusia (X1) terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali (Y).

Pengujian hipotesis ke 5 uji F terhadap komitmen organisasi (X2), sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) sebagai moderasi, dan interaksi antara komitmen organisasi (X2) dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) (X2X4) diperoleh hasil nilai F hitung sebesar 18,088 jauh lebih besar dari pada F tabel sebesar 2.672 (F hitung > F tabel) dengan nilai p- value sebesar 0,000 atau < nilai probabilitas 0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga hipotesis ke 5 dapat diterima, yang berarti bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) dapat memoderasi komitmen organisasi (X2) terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali (Y).

Pengujian hipotesis ke 6 uji F terhadap faktor regulasi/kebijakan (X3), sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) sebagai moderasi, dan interaksi antara faktor regulasi/kebijakan (X3) dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) (X3X4) diperoleh hasil nilai F hitung sebesar 19,398 jauh lebih besar dari pada F tabel sebesar 2,672 (F hitung > F tabel) dengan nilai p-value sebesar 0,000 atau < nilai probabilitas 0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga hipotesis ke 6 dapat diterima, yang berarti bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X4) dapat memoderasi faktor regulasi/kebijakan (X3) terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali (Y).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa :

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah.
2. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja.
3. Regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja.
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja.
5. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai

moderasi.

6. Regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja.
7. Dari ketiga tahap, analisis regresi yang dilakukan, variabel kompetensi sumber daya manusia sistem informasi pengelolaan keuangan sebagai moderasi dan interaksi kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil analisis regresi tahap 1 yang paling kuat analisis regresinya karena koefisien regresinya paling tinggi sebesar 0.268 dan signifikasinya paling sempurna sebesar 0,00.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran disampaikan kepada peneliti berikutnya, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga lainya :

1. Salah satu sumbangsih yang cukup berperan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah realisasi penyerapan anggaran belanja. sesuai rencana oleh karena itu Pemerintah Provinsi Bali hendaknya memperhatikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, regulasi/kebijakan serta pengoperasian system informasi pengelolaan keuangan daerah sehingga realisasi penyerapan anggaran belanjadapat ditingkatkan sesuai rencana.
2. Walaupun hasil penelitian ini variabel bebas searah dengan variabel terikatnya, sebaiknya pejabat pemegang kendali di Pemerintah Provinsi Bali sebaiknya menganggarkan biaya yang dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya pelatihan terkait dengan penggunaan sistem inpormasi pengelolaan keuangan daerah
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna memberikan hasil yang lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- Delia, Titin, Syahril Djaddang, Suratno, and JMV. Mulyadi. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran Dan Politik Anggaran Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Satuan Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan. Program Studi Akuntansi, Pascasarjana Universitas Pancasila." *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan Vol. 4(1), 2021, Halaman 116 - 131.*
- Jogiyanto. 2021. "Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi." Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi.* 1st ed. Yogyakarta.
- Kristianingsih, Eni, Agus Wahyudin, and Sukirman.

2022. “Determinan Kualitas Penyerapan Anggaran Belanja Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi Negeri Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek).” *Business and Economic Analysis Journal*.

Ningtyas, W. P. M. 2020. “Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa, Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Empiris Di OPD Kabupaten Magelang). Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang.”

Oktaliza, Yola, Muhammad Ahyaruddin, and Annie Mustika Putri. 2020. “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal.”

- Ramadhani, Rifka Setiawan, and Mia Angelina. 2019. "Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No. 2, Seri B, Mei 2019, Hal 710-726.*
- Ramdani, Mochamad. 2023. "Strategi Pemerintah Kota Bogor Dalam Meningkatkan Dan Mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.*
- Safpremi, Yolla, and Annie Mustika Putri. 2022. "FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN." *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Vol 7, No 2, November 2022, Hal 188 - 199, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia.*
- Safpremi, Yolla, Annie Mustika Putri, and Muhammad Ahyaruddin. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasaman. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 7, No 2, November 2022, Hal 188 – 199.*"
- Santoso, and Singgih. 2019. *Mahir Statistik Parametrik: Konsep Dasar Dan Aplikasi Dengan SPSS.* edited by P. E. M. Komputindo. Jakarta:
- Sari, Novita Dayang, Maria, and Desi Indriasari. 2023. "Factors Influencing Government Regional Government Organizational Expenditure Budget Absorption Palembang City. *Costing Journal of Economic, Business and Accounting Volume 6 Nomor 2, Januari-Juni 2023 e-ISSN: 2597-523.*"
- Sirin, Ahmad, Indarto, and Wyati Saddewisasi. 2020. "Determinan Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Moderating Variabel Di Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis.*
- Ulandari, Viki, Akram, and Budi Santoso. 2021. "Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Dengan Administrasi Sebagai Pemoderasi." . . *E-Jurnal Akuntansi, 31(6), 1577-1591.*
- Wiansyah, Dheyah Rahmani, and Sri Mulyani. 2021. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Di Pemerintah Kota Yustika, A. E. 2022. "Perekonomian Indonesia: Catatan Dari Luar Pagar, Malang Bayumedia Publishing."